Alarm Kota Bogor: Angka Kekerasan di Sekolah Meroket Tajam

Laporan kasus ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) melonjak **74%**, dari 31 kasus (2023). kasus yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan (UPTD PPA) meningkat lebih **dari dua kalii lipat**, dari **7 menjadi 17 kasus** pada yang sama.

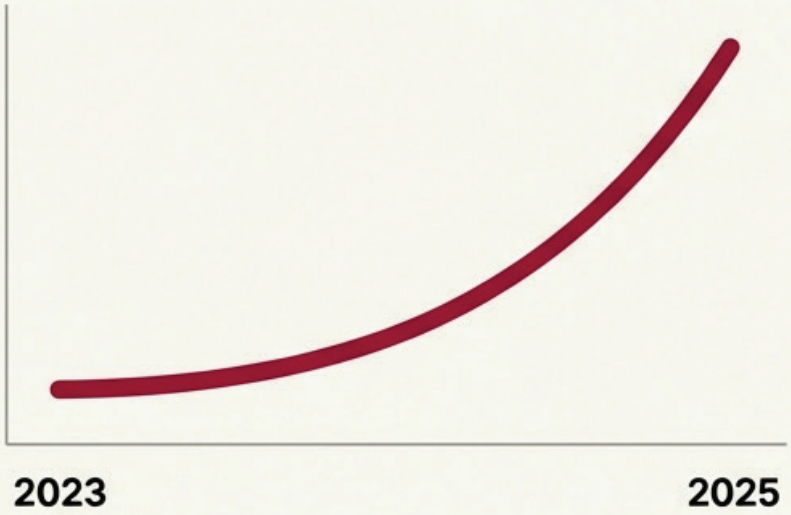

+74%

Laporan kasus ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah **(KPAID) melonjak 74%**, dari **31 kasus (2023) menjadi 54 kasus (per Nov 2025).**

Kasus yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) **meningkat lebih dari dua kali lipat**, dari **7 menjadi 17 kasus** pada periode yang sama.

Angka-angka ini adalah sinyal kuat bahwa eskalasi kekerasan adalah fenomena nyata yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan tepat.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Membedah Lanskap Kekerasan: Perundungan dan Kekerasan Fisik Mendominasi

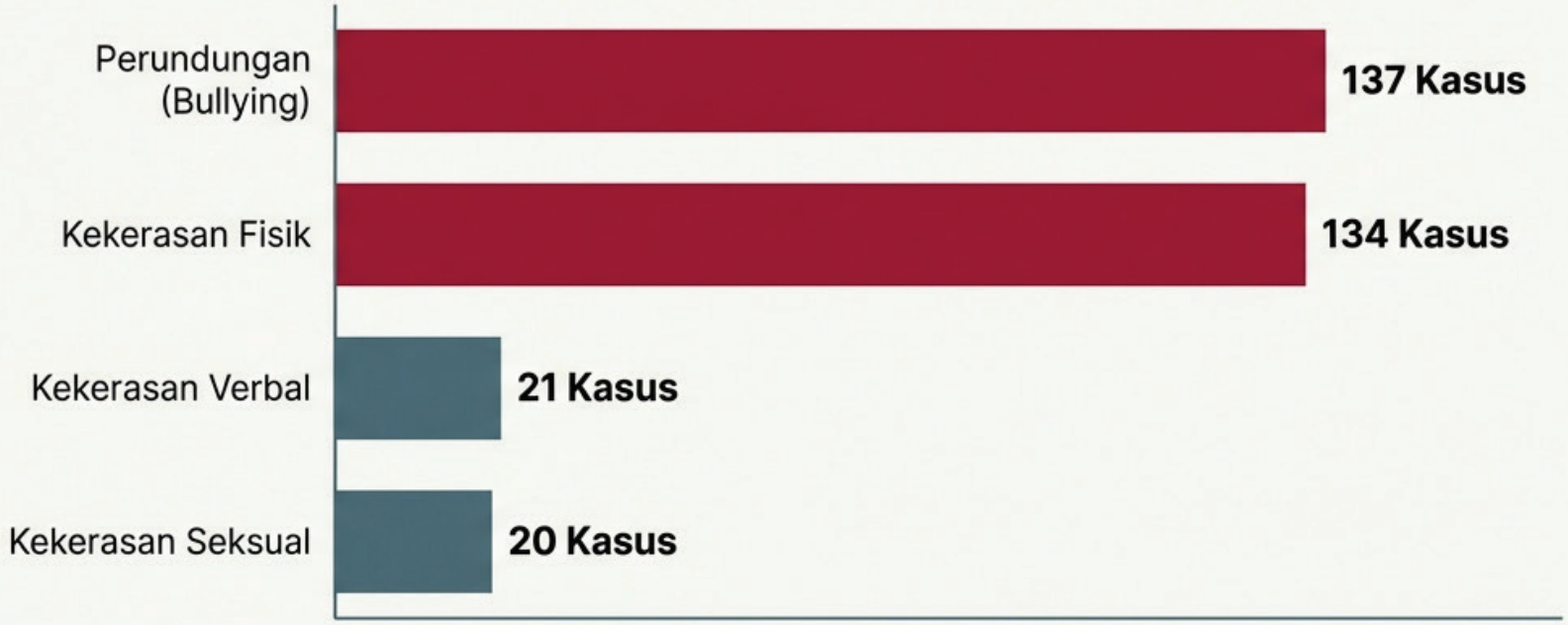

Dominasi **perundungan** dan **kekerasan fisik** menunjukkan **intimidasi** dan **agresi** telah mengakar dalam interaksi sosial siswa.

Catatan Kritis: Tingginya angka kekerasan fisik (112 dari 134 kasus) sebagian besar didorong oleh peliputan media, mengindikasikan bahwa insiden fisik yang eskalatif lebih mungkin menjadi sorotan publik.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Siapa yang Paling Terdampak? Kerentanan Lintas Jenjang Pendidikan

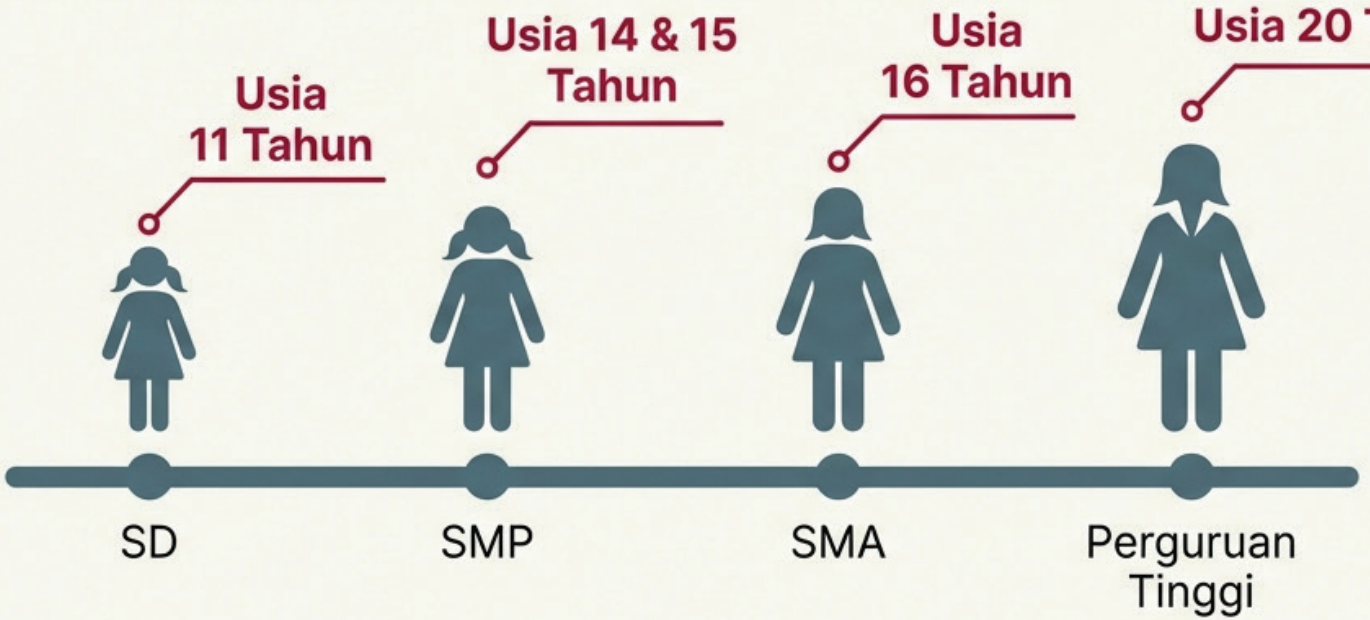

Pernyataan KPAID: "Perempuan dan Anak paling rentan terimbas Kasus Kekerasan."

Pola ini menunjukkan kerentanan berbasis gender adalah tantangan persisten yang berevolusi di sepanjang jenjang pendidikan, menuntut strategi perlindungan yang adaptif.

NEW JPPI NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA — JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Titik Rawan Kekerasan: Momen Kritis di Luar Pengawasan Ruang Kelas

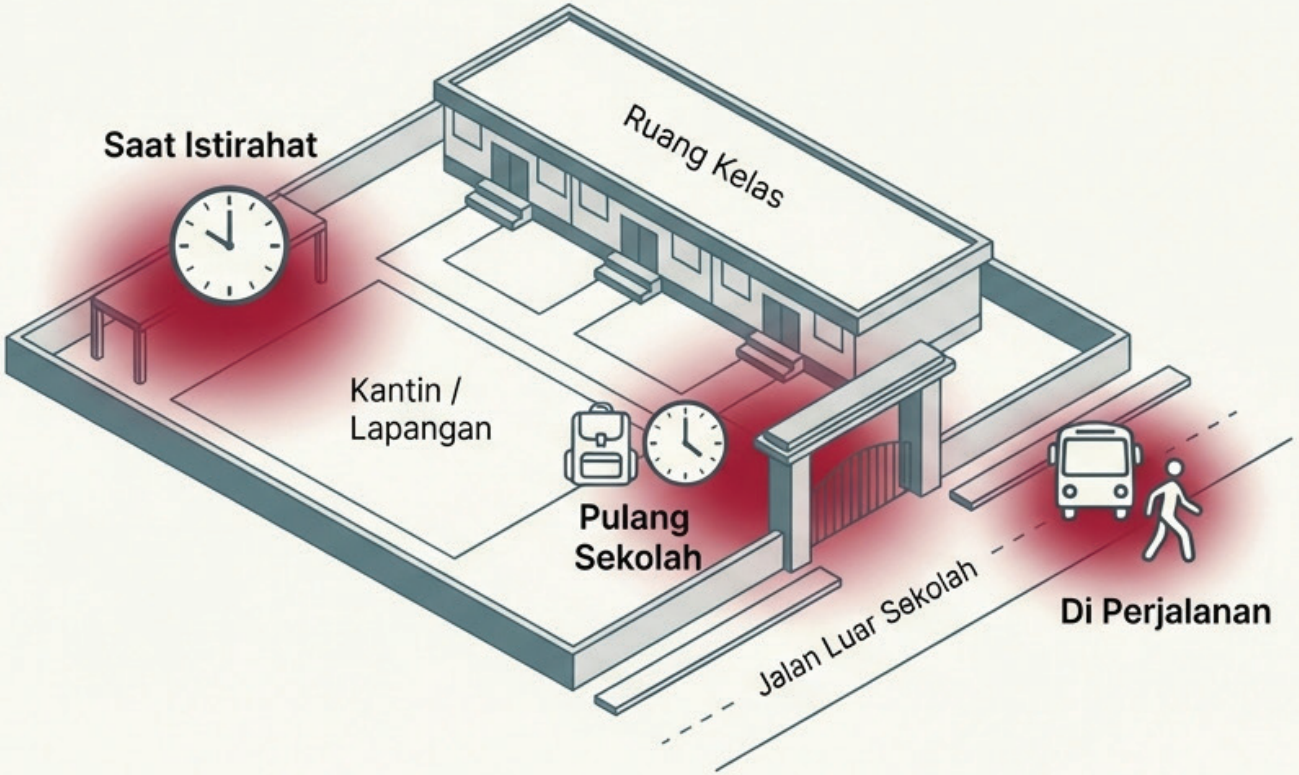

Momen-momen ini merupakan area dengan pengawasan yang lebih longgar, memberikan peluang lebih besar bagi pelaku.

Temuan ini menantang paradigma bahwa keamanan sekolah hanya terbatas di dalam ruang kelas.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Paradoks Kebijakan: Di Atas Kertas, Sistem Kita Seharusnya Sempurna

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Kota Bogor memiliki fondasi kebijakan multi-lapis dan komprehensif yang memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Infrastruktur Terpasang: Hampir 10.000 Anggota TPPK Siaga di 97% Sekolah

9.884
Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

1.007
Satuan Pendidikan

97,72%
Cakupan Sekolah

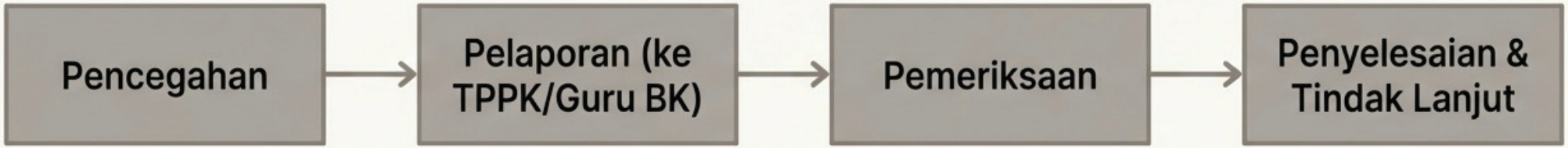

Keberadaan TPPK ini didukung oleh Satuan Tugas (Satgas) PPKSP tingkat Kota Bogor yang berfungsi sebagai koordinator dan eskalasi penanganan.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Puncak Gunung Es: Realitas yang Jauh Tersembunyi di Bawah Permukaan

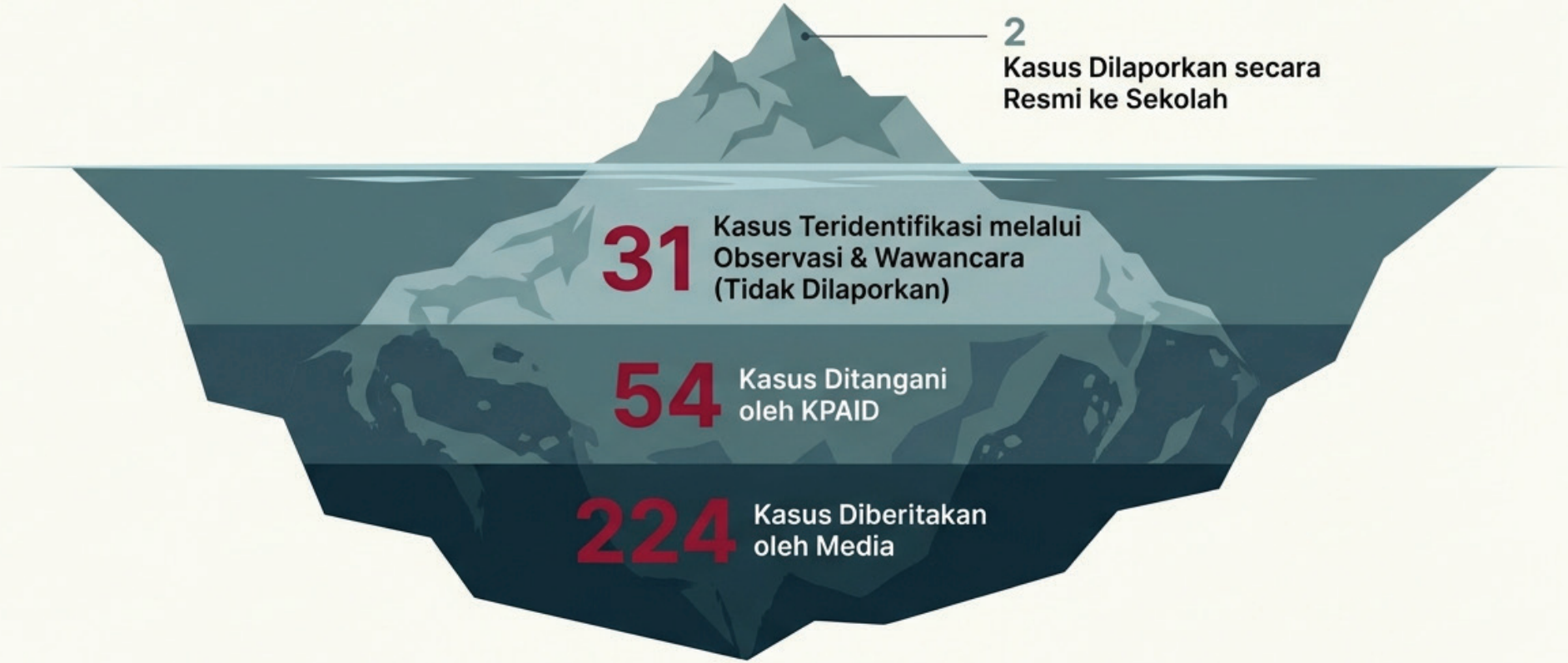

Disparitas ekstrem ini adalah bukti nyata fenomena gunung es, di mana kasus yang muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Akar Masalah Sebenarnya: "Budaya Diam" yang Melumpuhkan Sistem

"...takut akan stigma..."

"...ancaman balas dendam..."

"...tekanan untuk menjaga nama baik sekolah"..."

Budaya Diam

(Culture of Silence)

"...banyak korban memilih berdamai..."

"...banyak korban memilih berdamai..."

"...diam agar tidak malu kasusnya diketahui orang banyak..."

"...kasus masih bisa diselesaikan secara internal."

Pernyataan dari pemangku kepentingan

NEW NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA JPPI JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Mengapa Budaya Diam Mengakar Kuat? Kendala Internal dan Eksternal

Kendala Internal Satuan Pendidikan

Keterbatasan Kapasitas: Kurangnya pelatihan memadai bagi TPPK dan guru; pemahaman minim tentang kekerasan non-fisik.

Resistensi Institusional: Keengganan melapor untuk 'menjaga nama baik sekolah', diperkuat oleh sikap pemangku kepentingan.

Kelemahan Sistemik: Koordinasi lemah dengan lembaga eksternal; tidak ada mekanisme deteksi dini.

Tantangan Eksternal & Faktor Pemicu

Dukungan Orang Tua Minim: Cenderung menolak proses hukum atau permisif terhadap kekerasan.

Pengaruh Media Sosial Negatif: Stimulan untuk meniru perilaku agresif.

Lingkungan Terdekat: Kebiasaan berkata kasar dari rumah, ketimpangan sosial-ekonomi.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Membongkar Budaya Diam: Empat Rekomendasi Strategis untuk Intervensi Tepat Sasaran

Rekomendasi berikut dirancang secara spesifik untuk mengatasi akar masalah dan kendala implementasi yang telah teridentifikasi.

1. Penguatan Kapasitas TPPK & Pendidik

2. Pembangunan Ekosistem Terbuka

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektoral

4. Optimalisasi Deteksi Dini Berbasis Data

NEW JPPI NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA — JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Rekomendasi 1: Perkuat Kapasitas TPPK Menjadi Garda Terdepan yang Kompeten

MASALAH YANG DIATASI

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi.

SOLUSI YANG DIUSULKAN

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan **program pelatihan teknis yang berkelanjutan dan tersertifikasi** bagi seluruh anggota TPPK dan guru BK.

MATERI PELATIHAN KUNCI

Teknik investigasi kasus yang berperspektif korban.

Metode mediasi konflik yang konstruktif.

Pemberian pertolongan pertama psikologis (*psychological first aid*).

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Rekomendasi 2: Ciptakan Ekosistem Terbuka Melalui Kampanye 'Berani Lapor Itu Hebat'

MASALAH YANG DIATASI

Budaya Diam (*Culture of Silence*).

SOLUSI YANG DIUSULKAN

1. Implementasi **Kampanye 'Berani Lapor Itu Hebat'** secara masif di setiap satuan pendidikan.
2. **Integrasi kampanye** ke dalam kegiatan kurikuler seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

ELEMEN KUNCI

Menyusun dan mensosialisasikan SOP pelaporan yang secara **eksplisit menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor** dari segala bentuk intimidasi. Jaminan ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada siswa dan orang tua.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Rekomendasi 3: Bangun Kolaborasi Lintas Sektor & Libatkan Orang Tua Secara Aktif

MASALAH YANG DIATASI

Koordinasi Lemah dan
Koordinasi Lemah dan
Minimnya Dukungan Orang Tua.

SOLUSI SISTEMIK

Pembentukan Forum Komunikasi PPKSP Kota Bogor: Melibatkan Satgas PPKSP, perwakilan TPPK, UPTD PPA, KPAID, dan Unit PPA Kepolisian.

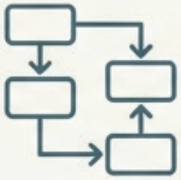

Pengembangan Protokol Rujukan Lintas Sektoral: Memastikan alur penanganan kasus yang jelas, cepat, dan tidak tumpang tindih.

Program Edukasi Wajib bagi Orang Tua/Wali Murid Baru: Mengenai pola asuh positif dan dampak psikologis kekerasan pada anak.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Rekomendasi 4: Cegah Sejak Dini dengan ‘Peta Pengawasan Kerawanan’ Berbasis Data

MASALAH YANG DIATASI

Kurangnya Mekanisme Deteksi Dini.

SOLUSI YANG DIUSULKAN

Setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk mengembangkan **‘Peta Pengawasan Kerawanan’** ***(Vulnerability Supervision Map)*** berdasarkan data waktu dan lokasi rawan.

TINDAKAN KONKRET

- Peta ini menjadi dasar **alokasi jadwal piket guru secara dinamis dan efektif.**
- Meningkatkan kehadiran pengawas di area-area non-kelas yang rawan (kantin, halaman belakang, gerbang sekolah) pada jam-jam kritis (istirahat dan pulang sekolah).

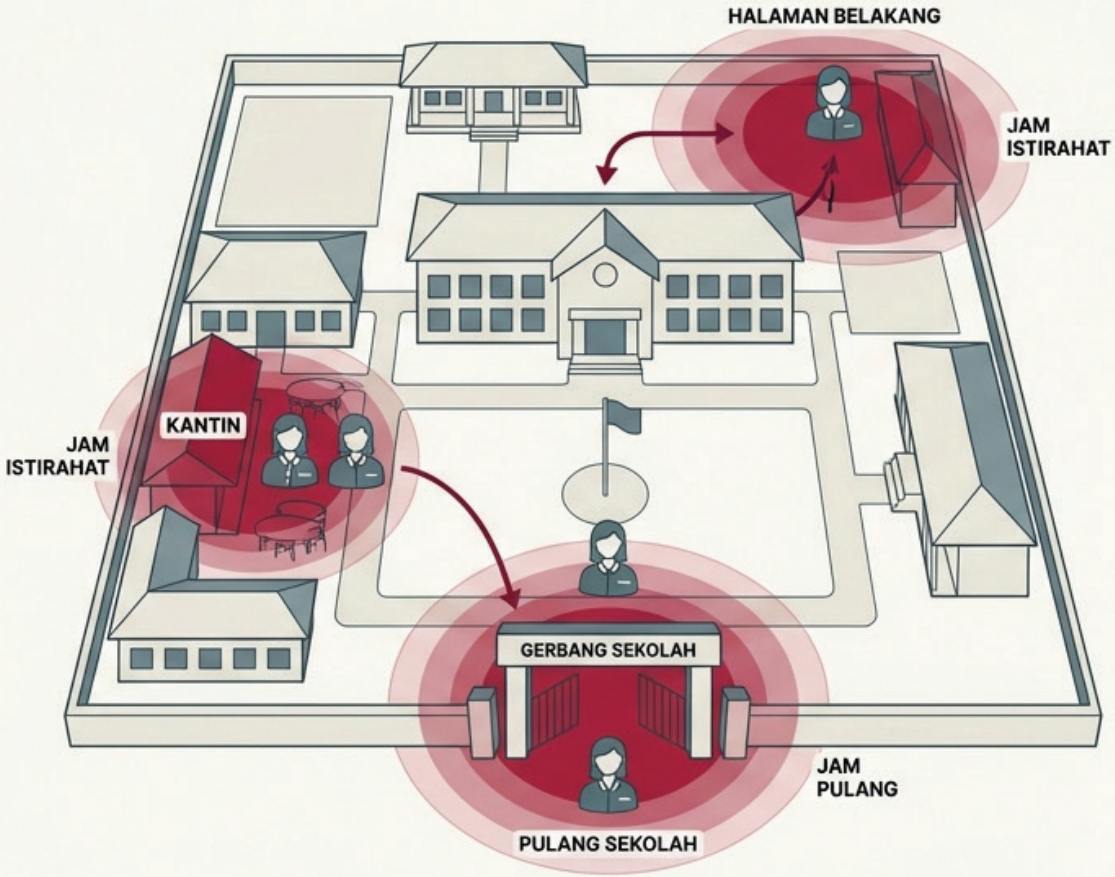

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA

Mewujudkan Sekolah Aman: Ini Bukan Sekadar Program, Ini Komitmen Kolektif

Kesenjangan antara laporan formal dan realitas menegaskan adanya **'Budaya Diam'** yang harus dibongkar.

Keberhasilan PPKSP bukanlah tentang membentuk tim, melainkan membangun **ekosistem kepercayaan** di mana setiap individu merasa aman untuk belajar dan bersuara.

Seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, dinas terkait, kepala sekolah, guru, orang tua, hingga siswa—diajak **untuk berkolaborasi secara serius.** Hanya dengan **kerja bersama**, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk **kekerasan** bagi seluruh anak di Kota Bogor.

NEW JPPI
NETWORK FOR EDUCATION WATCH INDONESIA
JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA